

BAB VI PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Tahap Perencanaan kurang efektif karena dalam proses perencanaan pemerintah Kabupaten Malaka memang memiliki dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD sampai dengan Rencana Kerja Anggaran APBD namun terpusat pada triwulan keempat yang mengakibatkan ada anggaran belanja modal tidak dicairkan.
2. Tahap pelaksanaan kurang efektif karena berdasarkan dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD yang dikeluarkan hampir semua item belanja modal belum terealisasi secara menyeluruh.
3. Tahap penatausahaan dikatakan efektif karena sudah mampu menghimpun dan mencatat laporan-laporan dari setiap SKPD yang diperlukan untuk di laporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban efektif karena Kabupaten Malaka telah membuat 7 (tujuh) laporan keuangan yang dimuat dalam LKPD secara lengkap.
5. Tahap pengawasan kurang efektif karena Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka kurang memperketat pengawasan terhadap proses pengerjaan yang mengakibatkan keterlambatan pembangunan dari waktu yang sudah ditentukan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis pengelolaan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Malaka, maka peneliti sapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Malaka, dalam tahap pelaksanaan, diharapkan Pemerintah Kabupaten Malaka harus lebih memaksimalkan anggaran yang sudah diterima sehingga proses pelaksanaan belanja dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
2. Bagi pihak pengawas, agar tidak lalai dalam mengawasi para pekerja sehingga tidak terjadi kecurangan dan bisa selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan.
3. Bagi peneliti lain, diharapkan tulisan ini dapat dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam lingkup yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. UUP STIM YKPN Yogyakarta.
- Bastian, Indra, 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2013. *Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- K Daniel, Hariyati. 2014. *Analisis Belanja Modal dan Penyajiannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tohohon*.
- Nordiawan, Deddi, dkk. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*, edisi 1, Salemba Empat, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Solikhah, Imroatus. 2014. *Analisis Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa*.
- Sugiyanta. 2016. *Analisis Belanja Modal dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kabupaten/kota di Indonesia*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keungan Negara.